

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bahu Malalayang Satu Kota Manado

Jericho Danga Pombengi¹, Joyce Jacinta Rares², Prety Wungow³

Ledya Wonok⁴, Tesalonika Mundung⁴, Christian Mandagi⁵

¹⁻⁵Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sam Ratulangi

¹richo_pombengi@unsrat.ac.id, ²joy.rares09@gmail.com, ³pretywungoww@gmail.com

Corresponding author: pretywungoww@gmail.com

Submitted: 29/04/2026; Revised: 09/06/2026; Published: 01/07/2026

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v9i2.485>

Abstract

The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance policy designed to improve the welfare of poor and vulnerable households through enhanced access to education, health, and social welfare services. This study evaluates the implementation of PKH in Malalayang Satu Village, Manado City, by identifying its achievements, implementation constraints, and opportunities for improvement. The study employed a descriptive qualitative approach through a literature review of scholarly articles, books, policy documents, and other relevant secondary sources. The analysis applied a public policy evaluation perspective, focusing on effectiveness, efficiency, responsiveness, and equity. The findings indicate that PKH has contributed to meeting the basic needs of beneficiary families, particularly by supporting children's education, access to health services, and household purchasing power. The program also provides an important social protection mechanism for families facing economic vulnerability. Nevertheless, several implementation challenges remain, including inaccuracies in beneficiary targeting, limited capacity of programme implementers, uneven transparency in aid distribution, and the tendency of some beneficiaries to use assistance primarily for short-term consumption. These conditions may limit the programme's capacity to promote long-term economic independence. The study concludes that PKH implementation needs to be supported by more accurate and integrated beneficiary data, strengthened social assistance and monitoring, transparent complaint-handling mechanisms, and empowerment programmes linked to skills development and income-generating activities. Such measures are essential to improve programme accountability, equity, and sustainability in Malalayang Satu Village.

Keywords: Community Welfare; Family Hope Program; Policy Evaluation; Social Assistance; Social Protection.

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan melalui penguatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi PKH di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado, dengan mengidentifikasi capaian, kendala pelaksanaan, dan peluang perbaikannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan sumber data sekunder lain yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan perspektif evaluasi

kebijakan publik dengan fokus pada aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan keadilan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH telah berkontribusi dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, terutama melalui dukungan terhadap pendidikan anak, akses layanan kesehatan, dan peningkatan daya beli rumah tangga. Program ini juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial bagi keluarga yang menghadapi kerentanan ekonomi. Namun, implementasi PKH masih menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan kapasitas pelaksana, transparansi penyaluran bantuan yang belum merata, serta kecenderungan sebagian penerima memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek. Kondisi tersebut dapat membatasi peran program dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PKH perlu didukung oleh pemutakhiran data penerima yang terintegrasi, penguatan pendampingan sosial dan pengawasan, mekanisme pengaduan yang transparan, serta program pemberdayaan yang terhubung dengan pengembangan keterampilan dan kegiatan produktif. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan akuntabilitas, ketepatan sasaran, keadilan, dan keberlanjutan PKH di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.

Kata kunci: Bantuan Sosial; Evaluasi Kebijakan; Kesejahteraan Masyarakat; Perlindungan Sosial; Program Keluarga Harapan.

Pendahuluan

Kemiskinan adalah salah satu isu sosial yang rumit dan memiliki banyak dimensi, karena berhubungan tidak hanya dengan batasan ekonomi, tetapi juga meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan umum. Situasi ini menjadikan kemiskinan sebagai masalah strategis yang memerlukan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menangani kemiskinan, baik melalui program bantuan langsung maupun inisiatif pemberdayaan komunitas. Salah satu kebijakan yang signifikan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Program Keluarga Harapan dirancang bukan hanya sebagai bentuk dukungan konsumtif, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Melalui pemberian bantuan yang disertai kewajiban tertentu, seperti kehadiran anak di sekolah dan pemeriksaan kesehatan secara berkala, program ini diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan antargenerasi. Dengan demikian, PKH berfungsi tidak hanya sebagai perlindungan sosial yang bersifat sementara, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan sosial berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin (Kementerian Sosial Republik Indonesia,

2021). Di samping itu, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi PKH di wilayah perkotaan seperti Kelurahan Malalayang Satu yang memiliki karakteristik sosial ekonomi berbeda dibandingkan wilayah pedesaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, terutama terkait evaluasi pelaksanaan PKH secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Evaluasi kebijakan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program telah mencapai tujuan yang ditetapkan serta mengidentifikasi berbagai kendala dalam implementasinya (Dunn, 2018). Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas program bantuan sosial di masa mendatang.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas Program Keluarga Harapan di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado, serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menemukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program serta memberikan saran kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas dan kesinambungan program bantuan sosial di tingkat lokal.

Di Kota Manado, terutama di Kelurahan Malalayang Satu, PKH telah menjadi salah satu program unggulan dalam membantu kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah masalah yang memengaruhi efektivitas dari program ini. Beberapa penyebabnya termasuk penerima bantuan yang tidak sesuai, hambatan dalam hal administrasi dan birokrasi, serta minimnya keterbukaan dalam distribusi bantuan. Selain itu, adanya fenomena ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial juga menjadi isu yang harus mendapatkan perhatian serius.

Beraneka ragam penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan akses terhadap layanan pendidikan serta kesehatan. Namun, sebagian besar studi tersebut masih terfokus pada efek jangka pendek dan belum secara menyeluruh mengevaluasi aspek keberlanjutan. Di Kota Manado, khususnya di Kelurahan Malalayang Satu, PKH telah menjadi salah satu program unggulan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat

miskin. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas program. Beberapa di antaranya adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kendala dalam proses administrasi dan birokrasi, serta kurangnya transparansi dalam penyaluran bantuan. Selain itu, munculnya fenomena ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa PKH mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada dampak jangka pendek dan belum secara komprehensif mengkaji aspek keberlanjutan, khususnya terkait kemandirian ekonomi masyarakat penerima manfaat. Selain itu, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik meneliti implementasi PKH di tingkat kelurahan perkotaan, seperti di Malalayang Satu, yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda dengan wilayah pedesaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi, terutama terkait evaluasi pelaksanaan PKH secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Evaluasi ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana program telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas program di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Program Keluarga Harapan di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado, serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program bantuan sosial di tingkat lokal.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kategori penelitian deskriptif, bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Malalayang Satu. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang muncul di lapangan, terutama yang berhubungan dengan seberapa efektif kebijakan tersebut diimplementasikan.

Sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping sosial, dan aparat kelurahan yang terlibat dalam implementasi program tersebut. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap penting untuk memberikan informasi terkait fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dengan mengeksplorasi berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan serta kebijakan yang relevan. Alat utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang menggunakan pedoman studi literatur untuk mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data.

Dimensi yang diperhatikan adalah kesejahteraan sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber literatur yang relevan dan kredibel. Data yang dianalisis dalam penelitian ini merujuk pada teori evaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2018), yang mencakup efektivitas, efisiensi, dan kesetaraan (equity) dalam pelaksanaan program. Metode analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk disajikan dalam narasi yang terstruktur. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil temuan dari berbagai literatur dan menghubungkannya dengan kerangka teori yang diterapkan.

Pembahasan

Ketepatan Sasaran Penerima PKH

Ketepatan sasaran penerima bantuan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH). Program bantuan sosial yang tepat sasaran akan membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar secara lebih efektif dan adil. Sebaliknya, apabila terjadi kesalahan dalam pendataan penerima manfaat, maka tujuan program untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai secara optimal.

Dalam implementasinya di Kelurahan Malalayang Satu, masih ditemukan beberapa kendala terkait validitas data penerima bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses verifikasi dan pembaruan data penerima manfaat belum berjalan secara maksimal. Permasalahan tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan sosial karena dapat menimbulkan ketimpangan distribusi bantuan di tengah masyarakat.

Tabel 1. Distribusi Penerima Program Keluarga Harapan di Kelurahan Malalayang Satu

Kategori Penerima	Jumlah
Sangat Miskin	35
Miskin	40
Rentan Miskin	25
Tidak Layak	10

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2026

Melalui Tabel 1, terlihat bahwa masih ada penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria program. Situasi ini mengindikasikan adanya masalah dalam pengumpulan data dan proses verifikasi untuk penerima bantuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam penilaian kebijakan belum dilaksanakan secara maksimal. Dunn (2018) menjelaskan bahwa keadilan berhubungan dengan distribusi manfaat kebijakan kepada kelompok yang tepat. Ketidaktepatan dalam penentuan sasaran ini berpotensi menurunkan efektivitas program dalam mencapai visi utamanya, yaitu memberikan support kepada masyarakat yang berada dalam kemiskinan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek keadilan (equity) dalam evaluasi kebijakan belum terpenuhi secara optimal. Menurut Dunn (2018), keadilan berkaitan

dengan pemerataan manfaat kebijakan kepada kelompok sasaran yang tepat. Ketidaktepatan sasaran ini dapat mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat miskin.

Pemanfaatan Bantuan PKH

Pemanfaatan bantuan sosial oleh penerima manfaat menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan yang diterima diharapkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pola penggunaan bantuan oleh masyarakat dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan program dalam mendorong kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat menggunakan bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, penggunaan bantuan untuk kegiatan produktif masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan sosial masih lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dibandingkan pengembangan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

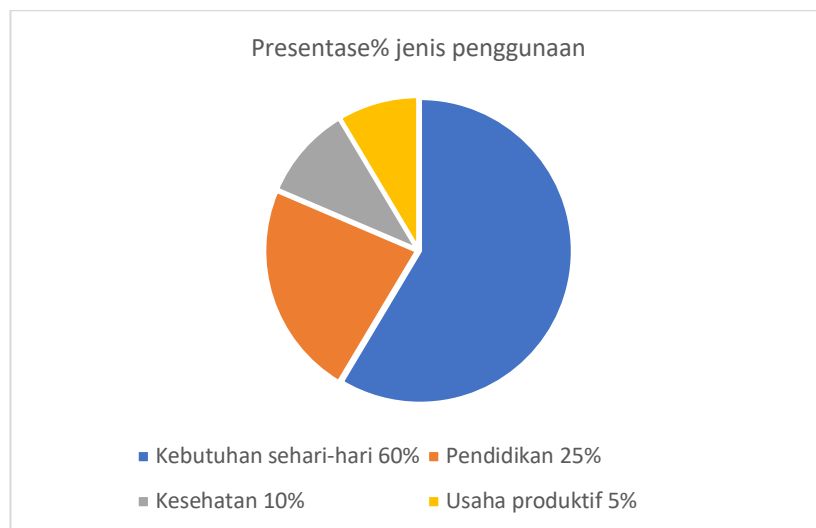


Diagram 1. Penggunaan Bantuan oleh Penerima PKH

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2026

Keadaan ini menggambarkan bahwa program PKH lebih difokuskan pada pencapaian kebutuhan dasar dibandingkan dengan memupuk kemandirian ekonomi. Dari

sudut pandang kesejahteraan sosial, ini memang memberikan manfaat positif dalam jangka pendek, namun tidak sepenuhnya efektif dalam menciptakan keberlanjutan. Mengacu pada pendapat Todaro dan Smith (2015), perbaikan kesejahteraan tidak hanya bergantung pada bantuan, melainkan juga pada peningkatan produktivitas masyarakat.

Implementasi Program PKH

Tabel 3. Tingkat Koordinasi Antar Pelaksana

Aspek Koordinasi	Kategori
Komunikasi	Cukup
Sumber daya	Terbatas
Disposisi pelaksana	Baik
Struktur birokrasi	Kompleks

Sumber: Hasil olahan data peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 3, terdapat kendala dalam sumber daya serta struktur birokrasi yang cukup kompleks dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum mencapai hasil yang optimal. Edward (1980) mengungkapkan bahwa suksesnya implementasi sangat terkait dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Keterbatasan sumber daya dan kerumitan birokrasi yang ditemukan dalam penelitian ini menjadi penghalang dalam pelaksanaan program PKH di lapangan.

Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian ekonomi dari penerima manfaat masih rendah dan menunjukkan adanya kecenderungan ketergantungan pada bantuan sosial. Keadaan ini menggambarkan bahwa program pemberdayaan masyarakat belum berfungsi secara maksimal. Chambers (1995) menekankan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar bisa mandiri. Namun dalam praktiknya, bantuan yang sifatnya konsumtif tanpa didukung oleh program pemberdayaan yang solid bisa berpotensi menimbulkan ketergantungan. Sejalan dengan itu, Suharto (2009) menyatakan bahwa tanpa adanya strategi pemberdayaan, bantuan sosial cenderung tidak dapat bertahan lama.

Evaluasi Program PKH

Secara keseluruhan, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, masih ada sejumlah hambatan dalam implementasinya.

Dari sudut pandang evaluasi kebijakan seperti yang dijelaskan oleh Dunn (2018), program ini belum sepenuhnya mencapai kriteria efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Efektivitas program masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok, efisiensi belum ideal karena ketidaktepatan sasaran, dan keadilan belum sepenuhnya terwujud karena distribusi bantuan yang tidak merata.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hastuti, Suryahadi, dan Sumarto (2018) yang menyatakan bahwa PKH mampu meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Penelitian Rachman (2020) juga menunjukkan bahwa bantuan sosial dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga penerima manfaat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas program belum optimal karena masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan rendahnya pemanfaatan bantuan untuk kegiatan produktif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Pratama (2019) yang menyatakan bahwa implementasi PKH masih menghadapi berbagai kendala administratif dan validitas data penerima manfaat. Selain itu, Widiyanto dan Lestari (2022) mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya serta kompleksitas birokrasi menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan sosial di daerah.

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian ekonomi penerima manfaat masih rendah dan terdapat kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan sosial. Temuan ini mendukung penelitian Yuliana (2023) yang menyatakan bahwa dampak jangka panjang program

bantuan sosial terhadap kemandirian ekonomi masyarakat masih terbatas. Penelitian Sari dan Putra (2021) juga menegaskan bahwa bantuan sosial akan lebih efektif apabila diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha produktif.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa PKH memiliki kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam aspek ketepatan sasaran, pemberdayaan ekonomi, dan koordinasi pelaksanaan program agar tujuan pembangunan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Malalayang Satu telah memberikan dampak positif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya maksimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian dalam sasaran penerima bantuan serta batasan dalam implementasi di lapangan. Penggunaan bantuan yang lebih banyak untuk kebutuhan konsumsi menandakan bahwa program ini belum sepenuhnya berhasil dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kerumitan birokrasi juga berkontribusi terhadap kurangnya efektivitas dalam penerapan program. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem pendataan penerima bantuan agar lebih sesuai target, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian ekonomi. Di samping itu, peningkatan koordinasi di antara pelaksana program juga sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan yang lebih efisien. Untuk penelitian di masa mendatang, disarankan agar dilakukan analisis yang lebih mendalam dengan memanfaatkan data primer melalui wawancara langsung dengan penerima manfaat dan pelaksana program, sehingga dapat mengungkapkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dampak Program Keluarga Harapan di tingkat masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E. (2011). *Public policymaking: An introduction* (7th ed.). Wadsworth Cengage Learning.
- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., Schmidt, T., & Pellerano, L. (2016). *Cash transfers: What does the evidence say? A rigorous review of programme impact and of the role of design and implementation features*. Overseas Development Institute.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and livelihoods: Whose reality counts?* Institute of Development Studies.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Ife, J. (1995). *Community development: Creating community alternatives*. Longman.
- Kabeer, N., & Waddington, H. (2015). Economic impacts of conditional cash transfer programmes: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Development Effectiveness*, 7(3), 290–303. <https://doi.org/10.1080/19439342.2015.1068833>
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. CIDES.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2021*.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy*. Elex Media Komputindo.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: Menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.